

Katalog: 9302023.1810

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PRINGSEWU
MENURUT PENGELUARAN**

2019 - 2023



Katalog: 9302023.1810

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PRINGSEWU
MENURUT PENGELUARAN**

2019 - 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PRINGSEWU**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PRINGSEWU
MENURUT PENGELUARAN 2019- 2023**

ISBN :

Nomor Publikasi : 18100.2405

Katalog BPS : 9302023.1810

Ukuran Buku : 21,5 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv + 68 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu

Dicetak Oleh:

CV. Jaya Wijaya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Eko Purnomo, SST, MM

Penulis:

Nisalasi Ikhsan Nurfathillah, S.ST

Pengolah Data:

Annisa Fauziatul Mardiyah, S.ST

Gambar Kulit:

Ayu Setianingsih, A.Md.Stat

<https://pringsewukab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran /expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

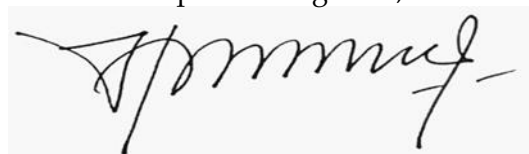
Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pringsewu, April 2024

KEPALA
BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Pringsewu,



Eko Purnomo

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16
2.5 Perubahan Inventori	20
2.6 Ekspor dan Impor	23
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PRINGSEWU MENURUT PDRB PENGELUARAN 2019-2023	27
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Pringsewu Menurut Pengeluaran	29
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	35
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	36
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	37
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	39
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	39
3.7 Perkembangan Net Ekspor	41
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PRINGSEWU MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019 - 2023	43

4.1. PDRB (Nominal)	45
4.2. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	46
4.3 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	47
BAB V PENUTUP	49
LAMPIRAN	53
DAFTAR PUSTAKA	65

<https://pringsewukab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019-2023 (Miliar Rp)	30
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019-2023 (Miliar Rp)	31
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019-2023 (Persen)	33
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019-2023 (Persen)	34
Tabel 5. Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019-2023 (Persen)	35
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Pringsewu, 2019-2023	36
Tabel 7. Perkembangan Konsumsi LNPRT Kabupaten Pringsewu, 2019-2023.....	37
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2019-2023	38
Tabel 9. Perkembangan PMTB Kabupaten Pringsewu, 2019-2023	39
Tabel 10. Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Pringsewu, 2019-2023.....	40
Tabel 11. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu, 2019-2023	45
Tabel 12. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Pringsewu, 2019-2023	46
Tabel 13. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pringsewu, 2019-2023.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Total PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019-2023 (Miliar Rp).....	30
Gambar 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019-2023 (Miliar Rp).....	31
Gambar 3. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu (Miliar Rupiah), 2019-2023.....	32

<https://pringsewukab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) , 2019-2023...	55
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019-2023...	56
Lampiran 3. Distribusi PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)	57
Lampiran 4. Distribusi PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)	58
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)	59
Lampiran 6. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)	60
Lampiran 7. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)	61
Lampiran 8. Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Pringsewu Menurut Pengeluaran, 2019-2023	62
Lampiran 9. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Pringsewu Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)	63

<https://pringsewukab.bps.go.id>

BAB I
PENDAHULUAN

<https://pringsewukab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://pringsewukab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun

2. Terhadap data poin ke1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan

sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota; b. PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)

- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu:

<p>PK-P adhBerlaku=</p> <p>Output non pasar–penjualan barangdan jasa + output Bank Indonesia</p>

Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten, PK-P Kabupaten adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten/Kota + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output kategori konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut Lapangan Usaha BPS Kabupaten.
- b. Laporan keuangan perusahaan.
- c. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- d. Hasil survei Matriks PMTB .
- e. Hasil survei Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- f. Hasil Survei (*raw data*) Industri Besar Sedang (IBS)

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output kategori konstruksi, hasil PDRB baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan*.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh Berlaku*. Untuk memperoleh nilai *adh Konstan* adalah dengan *men-deflate* PMTB (*adh Berlaku*) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB *adh Konstan* dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB *adh Konstan* terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB *adh Berlaku*, nilai PMTB *adh Konstan* tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB *adh Konstan* di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB *adh Berlaku* diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB *adh Konstan* adalah dengan cara *men-deflate* PMTB *adh Berlaku* dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB *adh Berlaku* untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan *adh Berlaku* dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan

PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini

adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar

atau persediaan; dan

- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv **Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan**

1. **Sumber data**

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Hasil survei IBS Tahunan
- b. Data komoditas perkebunan;
- c. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- d. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

2. **Metode Penghitungan**

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflatae perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR DAN IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor disuatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impur barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
- b. Ekspor/impur jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan ekspor-impor tahunan, adalah:

- a. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan.
- b. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang; dan
- c. Informasi lalu-lintas barang yang keluar masuk provinsi dari hasil survei.

Data yang tersedia tersebut digunakan sebagai pendukung hasil penghitungan dengan metode tak-langsung, ditambah dengan informasi dari hasil survei matriks arus komoditas (SMAK) yang menggali informasi tentang ekspor-impor antar kabupaten/kota secara sampel. Data yang digunakan dalam metode tak-langsung adalah:

- Struktur input;
- Struktur permintaan akhir menurut komoditas;
- Nilai tambah bruto adh Berlaku;
- Koefisien heterogenitas; dan
- IHPB barang dan IHK jasa-jasa (kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transpor dan komunikasi, serta jasa keuangan).

2. Metode Penghitungan

Metode penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota terdiri dari penghitungan untuk data tahunan adh Berlaku dan adh Konstan.

Penghitungan Ekspor/Impor adh Berlaku

Penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota dengan metode tak-langsung menggunakan metode *cross hauling*. Metode ini akan menghasilkan nilai ekspor-impor barang dan jasa di suatu kabupaten/kota. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap industri/komoditas di suatu perekonomian.

Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) untuk menuju kondisi *demand* dan *supply* yang seimbang di suatu perekonomian. Jika *supply* domestik suatu industri/komoditas di suatu kabupaten/kota melebihi kebutuhan (permintaan antara dan permintaan akhir), maka kabupaten/kota tersebut mengalami surplus dan akan melakukan ekspor. Sebaliknya, jika *supply* domestik komoditas di suatu kabupaten/kota tidak ada atau kurang, maka kabupaten/kota tersebut akan mengimpor (Kronenberg, 2008).

Asumsi yang digunakan dalam metode *commodity balance* adalah kelebihan dan kekurangan *supply* domestik atas *demand*, sepenuhnya diselesaikan dengan ekspor dan impor. Jika kelebihan *supply* domestik, maka akan melakukan ekspor, sedangkan jika kekurangan *supply* domestik, maka akan mengimpor. Hal ini membuat penghitungan ekspor-impor tersebut belum menangkap aspek lain di dalam transaksi ekspor-impor, karena dalam kenyataannya, baik dalam kondisi kelebihan atau kekurangan *supply* domestik, suatu kabupaten/kota dapat melakukan transaksi ekspor/impor secara bersama. Untuk mengatasi kelemahan ini, penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota perlu untuk disempurnakan dengan menerapkan metode *cross hauling*.

Metode *cross hauling* berusaha mengatasi kelemahan metode *commodity balance*, dengan mengakomodir kemungkinan suatu kabupaten/kota melakukan ekspor-impor komoditas secara bersamaan. Contoh, suatu kabupaten/kota, selain mengekspor komoditas pertanian ke luar daerah/luar negeri, juga melakukan impor komoditas pertanian yang merupakan output dari luar daerah/luar negeri.

Penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota menggunakan metode *commodity balance* dilakukan dengan cara sbb:

1. menyusun struktur input masing-masing industri dengan bantuan Tabel I-O yang tersedia;
2. mengalikan NTB menurut industri dengan rasio total input/output terhadap NTB;

3. mengalikan struktur input pada dari poin (1) dengan output dari poin (2). Dari proses ini dihasilkan biaya antara, NTB, dan total input/output dalam Tabel I-O bayangan;
4. menyusun struktur komponen permintaan akhir dengan bantuan Tabel I-O yang ada;
5. mengalikan masing-masing komponen permintaan akhir dengan struktur dari poin (4);
6. menghitung nilai ekspor neto (*trade balance*), yang merupakan selisih output (*supply* domestik) dengan permintaan domestik (antara dan akhir domestik);
7. jika net ekspor bernilai positif, diasumsikan terjadi ekspor, dan jika bernilai negatif diasumsikan terjadi impor;
8. menjumlahkan nilai ekspor dan impor komoditas dari poin (7) untuk mendapat nilai ekspor dan impor.

Selanjutnya, untuk menghitung ekspor-impor kabupaten/kota dengan metode *cross hauling*, dilakukan langkah seperti langkah yang dilakukan dalam metode *commodity balance* di atas, namun hanya sampai langkah ke (6). Penyesuaian dilakukan untuk langkah ke (7), sehingga urutannya menjadi:

1. melakukan langkah (1) s.d (6) seperti pada metode *commodity balance*;
2. menghitung koefisien heterogenitas berdasarkan Tabel I-O data yang tersedia, yaitu *trade volume* dikurangi nilai absolut *trade balance*. Hasilnya dibagi dengan jumlah output, permintaan antara, dan permintaan akhir domestik;
3. menghitung besarnya volume perdagangan (*trade volume*), yaitu menjumlahkan nilai absolut *trade balance* dengan hasil perkalian antara koefisien heterogenitas dan jumlah output, permintaan antara, dan permintaan akhir domestik;
4. nilai impor setiap komoditas diperoleh dengan mengurangi *trade volume* dengan *trade balance*, hasilnya dibagi dua;
5. nilai ekspor setiap komoditas diperoleh dengan menjumlahkan *trade balance* dan impor;
6. menjumlahkan nilai ekspor dan impor per komoditas pada langkah (5) untuk mendapat nilai ekspor dan impor.

Penghitungan adh Konstan

Penghitungan ekspor-impor antar kabupaten/kota adh konstan dilakukan dengan metode deflasi, dengan IHPB dan IHK sebagai deflatornya. Deflator untuk barang adalah IHPB, sedangkan jasa adalah IHK.

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN PRINGSEWU
MENURUT PDRB PENGELUARAN 2019 - 2023

<https://pringsewukab.bps.go.id>

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PRINGSEWU MENURUT PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2100 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

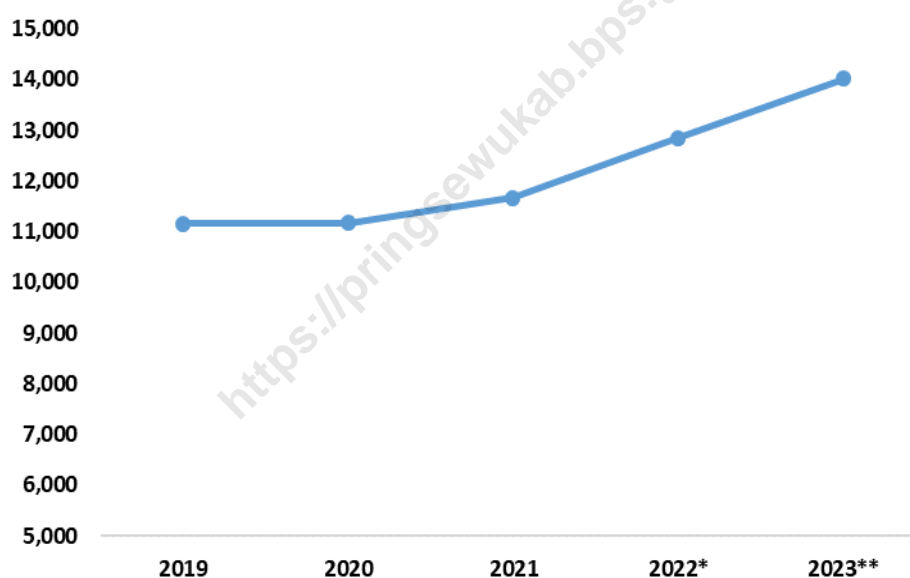
Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai pulih, perekonomian Kabupaten Pringsewu tahun 2023 juga mengalami pemulihan. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori transportasi dan perdagangan yang tumbuh sebesar 16,92 persen. Dari sisi permintaan, ekonomi Kabupaten Pringsewu didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2019 - 2023 PDRB Kabupaten Pringsewu atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 11.156,95 miliar Rupiah (2019); kemudian naik menjadi 11.166,16 miliar rupiah (2020), hingga pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 14.010,04 miliar Rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Pergerakan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Pringsewu pada periode 2019 - 2023 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2023 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Konsumsi Rumah Tangga	9.398,65	9.505,36	9.925,55	10.932,91	11.938,990
2.Konsumsi LNPR	199,08	194,07	205,32	217,34	248,96
3.Konsumsi Pemerintah	892,13	870,85	892,28	869,821	900,49
4. PMTB	3.516,80	3.424,24	3.661,02	3.947,91	4.252,67
5.Perubahan Inventori	33,82	169,11	241,94	266,13	290,69
6. Net Ekspor	-2.883,52	-2.997,47	-3.267,06	-3.392,02	-3.621,68
Total PDRB	11.156,95	11.166,16	11.659,05	12.842,10	14.010,05

Catatan: *Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara



Catatan: *Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Gambar 1. Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019-2023 (Miliar Rp)

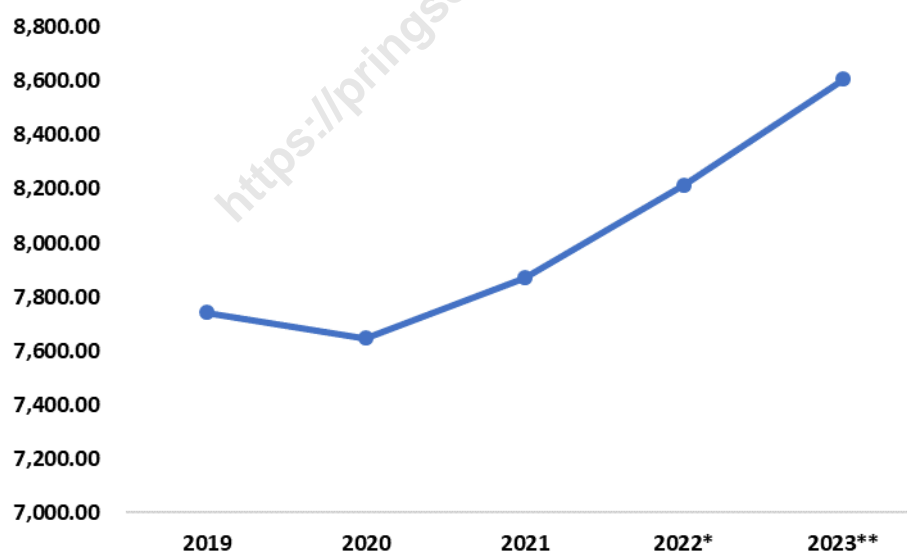
Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau

pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Pringsewu pada periode 2019 - 2023 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2023 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Konsumsi Rumah Tangga	6.235,19	6.162,58	6.243,18	6.535,09	6.806,82
2.Konsumsi LNPRT	121,75	116,42	120,13	121,88	134,82
3.Konsumsi Pemerintah	560,89	538,79	544,24	521,30	528,26
4. PMTB	2.435,30	2.313,50	2.423,54	2.497,64	2.611,48
5.Perubahan Inventori	27,32	145,88	172,70	176,29	185,42
6. Net Ekspor	-1.638,94	-1.629,51	-1.633,743	-1.638,22	-1.659,86
Total PDRB	7.741,50	7.647,66	7.870,04	8.213,97	8.606,94

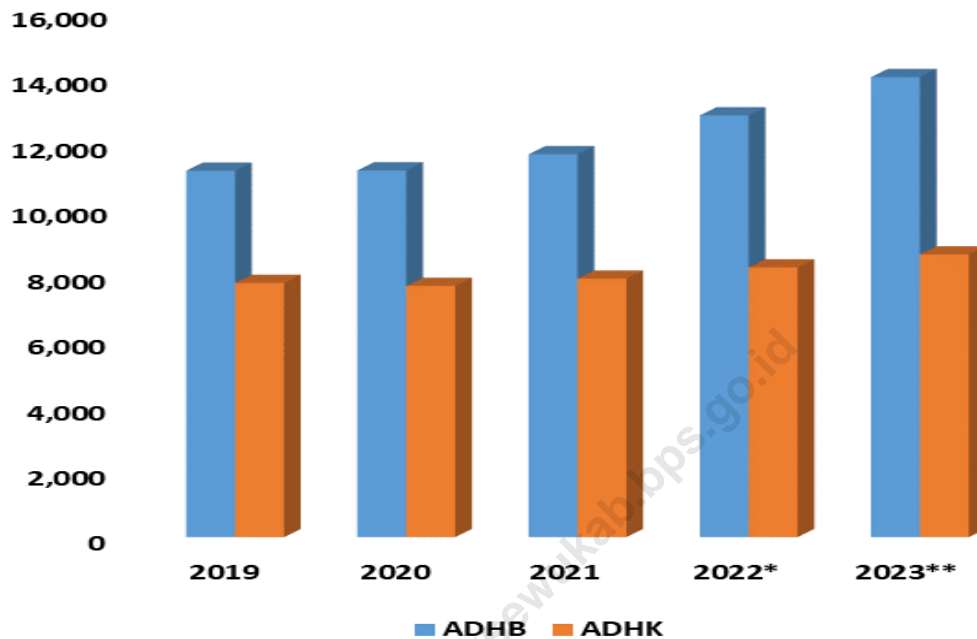
Catatan: *Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara



Catatan: *Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

Gambar 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019- 2023 (Miliar Rp)

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Pringsewu meningkat, yaitu dari 7.741,50 miliar Rupiah (2019); sedikit menurun menjadi 7.647,66 miliar Rupiah di tahun 2020; 7.870,04 miliar Rupiah (2021); 8.213,97 miliar Rupiah (2022); dan 8.606,94 miliar Rupiah. Dari gambar 2 terlihat adanya laju pertumbuhan ekonomi yang negatif pada tahun 2020, kemudian kembali naik pada tahun-tahun berikutnya.



Catatan: *Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

Gambar 3. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu (Miliar Rupiah), 2019 - 2023

Dari gambar 3 terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Konsumsi Rumah Tangga	84,25	85,12	85,13	85,14	85,22
2.Konsumsi LNPRT	1,78	1,74	1,76	1,69	1,78
3.Konsumsi Pemerintah	8,00	7,80	7,65	6,77	6,43
4. PMTB	31,52	30,67	31,40	30,74	30,35
5.Perubahan Inventori	0,30	1,51	2,08	2,07	2,07
6. Net Ekspor	-25,85	-26,84	-28,02	-26,41	-25,85
Total PDRB	100	100	100	100	100

Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (NX) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2019 - 2023, PDRB Kabupaten Pringsewu sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 30 s.d 31 persen. Sementara itu komponen net ekspor berkontribusi negatif, yang berarti impor masih lebih besar daripada ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada kisaran 6-8 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Begitu pula dengan konsumsi lembaga non profit (PK-LNPRT) yang hanya berkontribusi sekitar 1 persen.

Selain nilai yang telah dibahas diatas, agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Pringsewu sebelum tahun 2020 cenderung stabil dimana selalu berada di sekitar 5 persen. Namun keadaan di tahun 2020 jauh berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya, dimana terjadi pandemi covid-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, bahkan dunia. Pada kondisi ini, Kabupaten Pringsewu mengalami kontraksi sebesar 1,21 persen. Namun pada 2021 kondisi

perekonomian perlahan membaik sehingga pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif, walaupun masih rendah. Kemudian tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 4,37 persen dan akhirnya pada 2023 perekonomian kembali menguat sehingga tumbuh sebesar 4,78 persen.

Selain pertumbuhan secara total, dapat pula diamati pertumbuhan pada masing-masing komponen penyusun PDRB menurut pengeluaran. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019 – 2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Konsumsi Rumah Tangga	5,69	-1,16	1,31	4,68	4,16
2.Konsumsi LNPRT	9,58	-4,38	3,19	1,46	10,62
3.Konsumsi Pemerintah	2,95	-3,94	1,01	-4,22	1,34
4. PMTB	4,84	-5,00	4,76	3,06	4,56
5.Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
Total PDRB	5,03	-1,21	2,91	4,37	4,78

Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Hal ini dilihat dari laju indeks implisit yang bernilai positif, yaitu sebesar 4,11 persen.

¹ Indeks Perkembangan

**Tabel 5. Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pringsewu,
2019 - 2023 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Konsumsi Rumah Tangga	3,50	2,33	3,07	5,23	4,84
2.Konsumsi LNPRT	2,98	1,95	2,53	4,33	3,56
3.Konsumsi Pemerintah	1,98	1,62	1,44	1,77	2,16
4. PMTB	2,98	2,49	2,06	4,64	3,02
5.Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
Total PDRB	2,24	1,31	1,46	5,54	4,11

Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Pringsewu, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pringsewu maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pringsewu, 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
a. ADHB	9.398,64	9.505,36	9.925,55	10.932,91	11.938,90
b. ADHK 2010	6.235,19	6.162,58	6.243,18	6.535,09	6.806,82
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	84,24	85,13	85,13	85,13	85,22
Rata-rata konsumsi per-kapita/ tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	23.463	23.464	24.248	26.378	28.454
b. ADHK 2010	15.565	15.212	15.252	15.767	16.223
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	5,69	-1,16	1,31	4,68	4,16
b. Perkapita	4,80	-2,27	0,26	3,38	2,89
Jumlah penduduk (jiwa)	400.581	405.111	409.334	414.469	419.589

Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan terus berfluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada 2019 pertumbuhan konsumsi rumah tangga cukup tinggi mencapai 5 persen, namun pada 2020 terjadi pertumbuhan negatif yang merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19. Pada 2021 konsumsi rumah tangga kembali tumbuh positif namun hanya sebesar 1,31 persen, jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan sebelum adanya pandemi. Pada 2022 dan 2022 akhirnya pertumbuhan kembali meningkat namun masih di bawah 5 persen. Daya beli masyarakat yang mulai membaik menjadi sumber utama peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa penurunan total konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih baik dibandingkan penurunan konsumsi rumah tangga per kapita. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data

berikut menunjukkan peran LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran yang memperlihatkan proporsinya terhadap PDRB yang minor.

Tabel 7. Perkembangan Konsumsi LNPRT Kabupaten Pringsewu, 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (Miliar Rp)					
a. ADHB	199,08	194,07	205,32	217,34	248,96
b. ADHK 2010	121,75	116,42	120,13	121,88	134,82
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,78	1,74	1,76	1,69	1,78

Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pengeluaran konsumsi lembaga non profit adh berlaku tahun 2019 sebesar 199,08 miliar rupiah, terus meningkat hingga mencapai 248,96 miliar rupiah di tahun 2023. Jika dinilai adh Konstan 2010, maka nilai konsumsi lembaga swasta nirlaba tahun 2019 sebesar 121,75 miliar rupiah meningkat menjadi 134,82 miliar rupiah tahun 2023. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dibandingkan 2022 karena maraknya aktivitas lembaga non profit terutama pada jenis partai politik mengingat tahun 2023 sudah dimulai masa kampanye menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan anggota legislatif.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Pringsewu serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)					
a. ADHB	892,13	870,85	892,28	869,82	900,49
b. ADHK 2010	560,89	538,79	544,24	521,30	528,26
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	8,00	7,80	7,65	6,77	6,43
Konsumsi Pemerintah perkapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	2.227	2.150	2.180	2.099	2.146
b. ADHK 2010	1.400	1.330	1.330	1.258	1.259
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi Pemerintah	2,95	-3,94	1,01	-4,22	1,34
b. Konsumsi Perkapita	2,09	-5,01	-0,03	-5,40	0,10
Jumlah penduduk (jiwa)	400.581	405.111	409.334	414.469	419.589

Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah relatif meningkat, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2023 karena kenaikan belanja pegawai pemerintah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Walaupun demikian, adanya beberapa peraturan pada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai menyebabkan kenaikan belanja pegawai tidak terlalu tinggi. Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan, dari 8,00 persen ditahun 2019 menjadi 6,43 persen pada tahun 2023.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, namun hal ini tidak serta merta diikuti dengan peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 2,23 juta rupiah, kemudian cenderung terus menurun sehingga menjadi 2,15 juta rupiah pada 2023.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 9. Perkembangan PMTB Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (Miliar Rp)					
a. ADHB	3.516,80	3.424,25	3.661,02	3.947,91	4.252,67
b. ADHK 2010	2.435,30	2.313,50	2.423,54	2.497,64	2.611,48
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	31,52	30,67	31,40	30,74	30,35
Pertumbuhan (%)					
Total PMTB	4,84	-5,00	4,76	3,06	4,56

Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Serupa dengan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRIT maupun pemerintah), PMTB tahun 2023 juga menunjukkan kenaikan baik secara nominal maupun riil. Secara umum, selama kurun waktu 2019-2023 pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai besaran angka 4,84 persen. Pertumbuhan negatif pada tahun 2020 disebabkan berkurangnya pembangunan fisik selama pandemi covid-19, baik yang dibiayai dari pemerintah maupun swasta (perorangan). Sementara pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 4,56 persen karena sudah kembali meningkatnya pembangunan fisik terutama dari anggaran pemerintah.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "**persediaan**" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net

ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 10 Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Pringsewu, 2019-2023

U r a i a n	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori (Juta Rp)					
a. ADHB	33.822	169.108	241.941	266.138	290.693
b. ADHK 2010	27.318	145.882	172.701	176.286	185.418
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,30	1,51	2,08	2,07	2,07

Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Secara umum, selama periode 2019-2023 nilai perubahan inventori bertanda positif, artinya terjadi penambahan persediaan setiap tahun. Jika dinilai atas dasar harga berlaku penambahan inventori tersebut berada dalam kisaran 33-290 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan penambahan inventori sekitar 27-185 miliar rupiah.

Dilihat dari kontribusi terhadap pembentukan PDRB, kontribusi perubahan inventori cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari 0,30 persen pada 2019 terus meningkat hingga kontribusinya mencapai 2,07 persen pada 2023.

3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
KABUPATEN PRINGSEWU MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2019 - 2023

<https://pringsewukab.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 11 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	11.156,95	11.166,16	11.659,05	12.842,10	14.010,04
- ADHK 2010	7.741,50	7.647,66	7.870,04	8.213,97	8.606,93
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
-ADHB	27.852	27.563	28.483	30.984	33.390
- ADHK 2010	19.326	18.878	19.226	19.818	20.513
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	4,15	-2,32	1,85	3,08	3,51
Jumlah penduduk (jiwa)	400.581	405.111	409.334	414.469	419.589
Pertumbuhan (%)	0,85	1,13	1,04	1,25	1,24

Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB per-kapita Kabupaten Pringsewu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 11), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Pringsewu rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar

nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. PDRB per-kapita Kabupaten Pringsewu di tahun 2023 tercatat 33,39 juta rupiah atau terjadi peningkatan sebesar 2,4 juta rupiah bila dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB perkapita riil mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2019 sebelum adanya pandemi covid-19.

4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah Kabupaten Pringsewu digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga, adapun untuk PMTB masih jauh tertinggal hanya setengah dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 12 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Pringsewu, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT ADHB (Miliar Rp)	9.398,65	9.505,36	9.925,55	10.932,91	11.938,90
Total PMTB ADHB (Miliar Rp)	3.516,80	3.424,25	3.661,02	3.947,91	4.252,67
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2,67	2,78	2,71	2,77	2,81

Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama kurun waktu 2019-2023 sebesar 2,75 yang artinya produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga lebih dari dua kali lipat dibandingkan yang digunakan untuk konsumsi PMTB. Perkembangan nilai rasio ini dari sebesar 2,67 di tahun 2019 menjadi 2,81 di tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan konsumsi akhir rumah tangga meningkat secara signifikan dibandingkan dengan perkembangan nilai investasi.

4.3 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 13 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pringsewu, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	9.398,65	9.505,36	9.925,55	10.932,91	11.938,90
b. LNPRT	199,08	194,07	205,32	217,34	248,96
c. Pemerintah	892,13	870,85	892,28	869,82	900,49
Jumlah	10.489,86	10.570,28	11.023,15	12.020,07	13.088,35
PDRB ADHB (Juta Rp)	11.156,95	11.166,16	11.659,05	12.842,10	14.010,04
Proporsi (%)	94,02	94,66	94,55	93,60	93,42

Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 13 menggambarkan proporsi total konsumsi akhir dari rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah yang mencapai rata-rata 94,05 persen dimana sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintah dan terakhir konsumsi LNPRT. Perkembangan nilai konsumsi akhir setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun proporsinya terhadap PDRB cenderung menurun. Pada tahun 2019 proporsi konsumsi akhir mencapai 94,02 persen, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 93,42 persen. Hal ini menggambarkan bahwa produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

BAB V

PENUTUP

<https://pringsewukab.bps.go.id>

1. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019 s.d 2023, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

LAMPIRAN

<https://pringsewukab.bps.go.id>

Lampiran 1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019-2023

JENIS PENGELUARAN	PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.398,65	9.505,36	9.925,55	10.932,91	11.938,90
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	199,08	194,07	205,32	217,34	248,96
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	892,13	870,85	892,28	869,821	900,49
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.516,80	3.424,24	3.661,02	3.947,91	4.252,67
Perubahan Inventori	33,82	169,11	241,94	266,13	290,69
Net Ekspor	-2.883,52	-2.997,47	-3.267,06	-3.392,02	-3.621,68
PDRB	11.156,95	11.166,16	11.659,05	12.842,10	14.010,05

Catatan

*: Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Lampiran 2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019-2023

JENIS PENGELUARAN	PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.235,19	6.162,58	6.243,18	6.535,09	6.806,82
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	121,75	116,42	120,13	121,88	134,82
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	560,89	538,79	544,24	521,30	528,26
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.435,30	2.313,50	2.423,54	2.497,64	2.611,48
Perubahan Inventori	27,32	145,88	172,70	176,29	185,42
Net Ekspor	-1.638,94	-1.629,51	-1.633,743	-1.638,22	-1.659,86
PDRB	7.741,50	7.647,66	7.870,04	8.213,97	8.606,94

Catatan

*: Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Lampiran 3
Distribusi PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran 2019-2023 (Persen)

JENIS PENGELUARAN	Distribusi PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	84,25	85,12	85,13	85,14	85,22
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,78	1,74	1,76	1,69	1,78
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,00	7,80	7,65	6,77	6,43
Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,52	30,67	31,40	30,74	30,35
Perubahan Inventori	0,30	1,51	2,08	2,07	2,07
Net Ekspor	-25,85	-26,84	-28,02	-26,41	-25,85
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan

*: Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Lampiran 4
Distribusi PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)

JENIS PENGELUARAN	Distribusi PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	80,54	80,58	79,33	79,56	79,09
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,57	1,52	1,53	1,48	1,57
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,25	7,05	6,92	6,35	6,14
Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,46	30,25	30,79	30,41	30,34
Perubahan Inventori	0,35	1,91	2,19	2,15	2,15
Net Ekspor	-21,17	-21,31	-20,76	-19,94	-19,29
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan

*: Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Lampiran 5
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran 2019-2023 (Persen)

JENIS PENGELUARAN	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran 2019-2023 (Persen)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,69	-1,16	1,31	4,68	4,16
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,58	-4,38	3,19	1,46	10,62
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,95	-3,94	1,01	-4,22	1,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,84	-5,00	4,76	3,06	4,56
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	5,03	-1,21	2,91	4,37	4,78

Catatan

*: Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Lampiran 6
Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran 2019-2023 (Persen)

JENIS PENGELUARAN	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2019-2023 (Persen)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	250,21	253,05	264,24	291,06	317,84
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	341,52	332,93	352,24	372,85	427,11
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	227,44	222,01	227,48	221,75	229,57
Pembentukan Modal Tetap Bruto	268,98	261,91	280,02	301,96	325,27
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	234,97	235,17	245,55	270,46	295,06

Catatan

*: Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Lampiran 7
Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Pengeluaran 2019-2023 (Persen)

JENIS PENGELUARAN	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran 2019-2023 (Persen)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	165,99	164,06	166,21	173,98	181,21
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	208,87	199,72	206,08	209,09	231,29
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	142,99	137,36	138,75	132,90	134,67
Pembentukan Modal Tetap Bruto	186,26	176,95	185,37	191,03	199,74
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	163,04	161,06	165,75	172,99	181,27

Catatan

*: Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Lampiran 8
Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Pringsewu Menurut Pengeluaran 2019-2023

JENIS PENGELUARAN	Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Pringsewu Menurut Pengeluaran				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	150,74	154,24	158,98	167,30	175,40
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	163,51	166,70	170,92	178,32	184,66
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	159,06	161,63	163,95	166,86	170,46
Pembentukan Modal Tetap Bruto	144,41	148,01	151,06	158,07	162,85
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	144,12	146,01	148,14	156,34	162,78

Catatan

*: Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Lampiran 9
Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Pringsewu Menurut Pengeluaran
2019-2023 (Persen)

JENIS PENGELUARAN	Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Pringsewu Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,50	2,33	3,07	5,23	4,84
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,98	1,95	2,53	4,33	3,56
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,98	1,62	1,44	1,77	2,16
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,98	2,49	2,06	4,64	3,02
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	2,24	1,31	1,46	5,54	4,11

Catatan

*: Angka sementara

** : Angka sangat sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://pringsewukab.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. , *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. , *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. , *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.

17. , *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.
18. , *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.
19. , *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No.76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, WashingtonDC, 1993

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONTIANAK**

Jl. Pagar Gunung Raya No. 10, Kecamatan Manjing Raya 68021
email: bps@bps.go.id / <http://bps.go.id> / <https://www.bps.go.id>

htt

p

S





1

p

r

i

n

g

S

e

W

u

k

a

b



b

p

S



g

O



i

d